**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

# HASIL ANALISIS DATA

Pada bab sebelumnya, menjelaskan temuan-temuan penelitian pada Film Dokumenter *Drty Vote* dengann menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Djik. Pada bab berikutnya akan memaparkan hasil dari teori tersebut yang dapat dianalisis pada tiga dimensi yakni: Struktur teks, Konteks Sosial dan Kognisi Sosial yang merupakan bagian terpenting dalam pembahasan ini. Temuan yang akan dibahas peneliti dengan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Djik adalah sebagai berikut:

* 1. **Adanya dugaan kecurangan yang terjadi di tingkat kepala daerah** Pada masa kampanye yang dilakukan oleh beberapa paslon ditemukan adanya potensi tidak netralnya pemimpin daerah dalam mendukung kampanye pada saat pemilu. Hal ini menimbulkan narasi kecrangan yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat di tingkat daerah. Beberapa kewenangan desa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Adanya bantuan sosial (Bansos) yang dijadikan tolak ukur pertama dalam mendukung salah satu paslon untuk memenangkan pemilu.41 Penyalahgunaan kewenangan tidak mungkin terjadi tanpa didahului adanya kewenangan. Dalam kasus tersebut terdapat UUD yang membahas tentang penyalahgunaan wewenang dari pemerintah berbunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

41 Gema Irhamdhika Yogi Ariska, ‗―Representasi Kecurangan Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter ‗Dirty Vote‘ (Studi Semiotika Charles Sanders Pierce)‖‘, *Jurnal Media Penyiaran*,

04.1 (2024), 8–10.

50

Republik Indonesia menjelaskan maladministrasi sebagai: ―perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan‖42 Dalam point tersebut dapat dianalisis menggunakan teori Van Djik yakni: struktur teks, konteks sosial dan kognisi sosial. Berikut bentuk-bentuk struktur teks dalam teori AWK yang terdapat dalam Film Dokumenter *Dirty Vote*.

* + 1. Struktur Teks

Zainal Arifin Mochtar (Menit ke 00:24:07)

―sebenarnya begini sebenarnya Kenapa wewenang kepala daerah itu potensial lagi-lagi penyalahgunaan terhadap wewenang kepala daerah khususnya yang PJ, itu menjadi sangat mungkin menjadi faktor untuk memenangkan pemilu khususnya untuk sebarannya kita lihat sebenarnya apa saja sih kewewenang kepala daerah yang potensial disalahgunakan itu yang pertama, dan yang paling penting tentu saja adalah soal mobilisasi birokrasi. Yang kedua bicara soal izin lokasi kampanye karena kemudian sangat mungkin dipikirkan mana yang boleh berkampanye dan tidak dan yang ketiga, adalah khususnya memberikan sanksi atau membiarkan kepala daerah yang tidak netral itu tetap menjabat kepala desa maksudnya nya kita bisa lihat

42 Nurwina Muhammad Faturrachman SY, ‗*Tinjauan Terhadap Tindakan Petahana Dalam Pemilihan Umum: Perbedaan Konsep Penyalahgunaan Kewenangan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan‟*, Ledhak Fakultas Hukum UNHAS, 2.1 (2024), 15–17.

Bagaimana Boby sebagai seorang kepala daerah di Medan itu menunjukkan sikap yang sebenarnya tidak netral dan kemudian sangat mungkin diterjemahkan itu adalah bagian dari upaya memobilisasi birokrasi.‖

* + - 1. Struktur Makro

Dalam struktur makro terdapat elemen Tema/Topik yang terdapat pada penelitian ini yang diambil dari dialog pada narasumber tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan dalam teks dialog tersebut. Sehingga masyarakat mudah untuk memahami dialog yang dipaparkan oleh narsumber tersebut.

*Tabel 4.1 Struktur Makro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Dialog di atas yang dikatakan oleh Zainal Arifin Mochtar pada menit 24:07 menjelaskan tentang temuan potensi penyalahgunaan wewenang pada pemerintahan daerah untuk berkampanye yang ditujukan salah satu paslon |

* + - 1. Superstruktur

Dalam Superstruktur terdapat elemen yakni skema. Skema tersebut dapat diartikan sebagai alur dalam cerita Film *Dirty Vote* tersebut, narasi yang diucapkan oleh narasumber merupakan sebagai pesan atau informasi yang struktur agar dapat mudah diapahami di kalangan masyarakat yang menonton film ini.

*Tabel 4.2 Superstruktur*

|  |  |
| --- | --- |
| **Skema/alur** | Dalam *scene* di atas pada narsumbuer Zainal Mochtar menjelaskan narasi kelanjutan dari Feri Amsari yang membahas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah pada masa kampaye. Terdapat keganjalan dalam wewenang yang di lakukan oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut ditemukan potensi pelanggaran dalam berkampanye yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah. Penjelasan tersebut didukung oleh data dan video yang di bentukkan dalam *power point*. Hasil tersebut di presentasikan dan ditayangkan melalui video agar masyarakat mengetahui fakta melalui narasi yang diucapkan oleh narasumber dengan  keakuratan data yang ditampilkan. |

* + - 1. Struktur Mikro

Dalam struktur mikro ini dapat diamati dan dianalisis bagian teks terkecil dalam suatu kalimat, anak kalimat, parafrase atau gambar.

*Tabel 4.3 Struktur Mikro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Semantik** (pernyataan yang ingin ditekan dalam narasi tersebut) | **Latar**  Dalam *scene* tersebut hal yang menjadi inti dalam narasi tersebut yakni terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam keberpihakan dalam mendukung salah satu paslon. Diamana sikap dari bawaslu kurang tegas dalam menanggapi kasus tersebut. Dimulai dari Boby Nasution yakni sebagai Walikota Medan yang melanggar aturan dengan adanya unsur kampanye yang mendukung paslon 02 untuk memenangkan pemilu. Disi lain, terdapat kasus deklarasi desa bersatu yang dihadiri oleh ribuan kepala desa yang di duga tertuju pada paslon tertentu. Kasus ini menuai kontroversi, karena tidak ada penegasan atau sanksi yang diberikan dari bawaslu. Sedangkan disisi izin dari kampanye dari paslon yang lainnya dicabut oleh pemda. Hal ini menimbulkan sikap tidak tegasnya bawaslu dalam  mengawal pemilu 2024. |

* + 1. Konteks Sosial

Dilihat dari *scane* Film *Drty Vote* terdapat konteks yang mempresentasikan adanya temuan Adanya dugaan kecurangan yang terjadi di tingkat Kepala Daerah.

* + - 1. *Scene* 1 (Menit ke 00:25:17- 00:27:21)

Zainal Arifin Mochtar

*Scene* tersebut teradapat temuan paling awal dalam pembahasan ini, yakni membahasan tentang adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah terhadap pemilu. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemerintahan daerah merupakan bentuk eksploitasi demokrasi yang mengugunakan masyarakat sebagai alat untuk kampanye pada paslon tertentu.

*Tabel 4.4 Konteks Sosial*



**Gambar 4.1 *scene* 1** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**

*Scene* ini menjelaskan adanya pelanggaran yang dilakukan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan yang diduga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berkampanye dalam mendukung salah satu paslon tertentu. Kasus tersebut seakan-akan Boby selaku walikota medan berupaya untuk memobilisasi birokrasi. Karena kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan rusaknya demokrasi pada negara ini. Sikap Boby tersebut

* + - 1. *Scene* 2 (Menit ke 00:25:42-00:27:21)

menunjukkan keberpihakan dalam salah satu paslon yang didukung. Lagi-lagi kegiatan tersebut tidak ada ketegasan dari lembaga independen yang seharusnya kepala daerah benar-benar harus menunjukkan sikap netral pada saat masa Pemilu.

Zainal Arifin Mochtar

*Scene* berikut memaparkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh bebagai kepala desa yang berkumpul di GBK dalam rangka ingin menuntut hak-hak kepala desa terkait anggaran dan kemajuan desa. Acara deklarasi desa bersatu menimbulkan Pro dan Kontra pasalnya acara tersebut diduga temuan adanya dukungan beperpihakan kepada paslon tertentu.

*Tabel 4.5 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.2 *scene* 2 (Sumber: Film Dokumenter**  ***Dirty Vote*)**  Pada s*cene* ini, Zainal Arifin Mochtar menjelaskan temuan penyalahgunaan wewenang |

kepala daerah dengan menyelenggarakan aksi deklarasi desa bersatu yang di laksanakan di GBK. Acara tersebut menuai kontroversi, karena kedapatan beperpihakan berpotensi mendukung salah satu paslon. Temuan tersebut didasari tidak jelasnya arah dari kegiatan tersebut yang berujung mendukung salah satu paslon tertentu. Meskipun narasi yang diucapkan dari salah satu kades desa yang bersikap netral akan tetapi pelasanaan acara tersebut masih pada masa-masa panasnya pemilu. Berkumpulnya ribuan kepala desa menjadi tolak ukur adanya potensi kampanye untuk mendapatkan suara pada paslon tertentu. Tujuan dasar deklarasi desa bersatu adalah menuntut pemerintah agar mempunyai rasa sikap peduli dengan perkembangan desa dengan memaksimalkan anggaran untuk pembangunan dan kebutuhan desa. Hal ini mendapat respon dari Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) yang menyatakan, bahwa kegiatan tersebut telah melanggar aturan karena kedapatan salah satu MC acara tersebut bernarasi adanya keberpihakan mendukung salah satu paslon.

* + - 1. *Scene* 3 (Menit ke 00:35:56-00:38:07)

Zainal Arifin Mochtar

Pada *scene* ini menjelaskan timses dari salah satu paslon yang mengintimidasi bebrapa salah satu kepala desa untuk memenangkan paslon yang akan didukung. Kasus tersebut seharusnya sudah menjadi pelanggaran serius terhadap proses pemilu akan tetapi, tidak ada tindakan kusus terkait kasus tersebut.

*Tabel 4.6 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.3 *scene* 3 (Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  Pada *scene* ini. narasumber memaparkan temuan adanya kecurangan yang dilakukan pada timses beberapa paslon kepada pemerintah desa. Kecurangan ini menekankan pemerintah desa agar mencari pendukung untuk memenangkan beberapa paslon tertentu. Pengakuan kepala desa ini membuat argument yang mengejutkan kepada  masayarakat. Paksaan mendukung salah satu |

* + - 1. *Scene* 4 (Menit ke 00:38:09-00:41:09)

paslon memberatkan para kades untuk mencari suara, dengan adanya bantuan bansos secara mendadak menjadi alibi pertama untuk mencari dukungan. Pemberian bansos secara tiba-tiba merupakan hal yang tidak wajar dan dapat melanggar aturan pada kampanye pemilu. Kepala desa didesak agar progam bansos dilaksanakan secara mendadak sebagai alat deklarasi dukungan terhadap beberapa paslon tertentu. Dalam kasus tersebut kepala desa juga dituntut untuk memperoleh suara minimal 50 persen dalam desa tersebut. Tuntutan ini membuat kepala desa menjadi kebingungan, karena kegiatan bagi-bagi bansos tidak termasuk progam perencanaan desa.

Bivitri Susanti

Bagian *scene* ini menjelaskan tentang anggaran Bansos yang tiba-tiba naik secara meroket pada saat menjelang pemilu. Menurut narasumber anggaran Bansos dari tahun sebelumnya masih relatif sama akan tetapi, menjelang

pemilu anggaran Bansos mengelami kenaikan yang signifikan.

*Tabel 4.7 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.4 *scene* 4** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  *Scene* diatas yang dipaparkan oleh Bivitri Susanti menjelaskan data tentang bantuan sosial (bansos) yang naik begitu signifikan. Pada masa pemilu angka anggaran bansos naik begitu cepat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Keluarnya anggaran tersebut yang dirasa tidak terstruktur dengan jelas seakan-akan adanya bansos menjadi alat untuk mencari suara untuk memenangkan pemilu. Pemberian bansos secara tiba-tiba pada saat pemilu merupakan hal yang tidak pantas untuk diterapkan, karena bansos sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk  membantu fakir miskin dan mensejahterakan |

kepentingan pada saat pemilu karena tujuan dasar bansos merupakan untuk asas dasar

kemanusiaan.

untuk

masyarakat

mengeksploitasi

masyarakat yang merupakan tugas dari undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Seharusnya bansos

tidak menjadi alat untuk para pejabat untuk

* + 1. Kognisi Sosial

Kognisi sosial merupakan dimensi yang berkaitan dengan wacana yang diproduksi melalui model atau skema yang memengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu objek. Dalam film dokumenter *Dirty Vote,* dimensi kognisi sosial akan menganalisis latar belakang narasumber dalam menyampaikan wacana yang disampaikan. Untuk memudahkan penerimaan infomasi secara jelas kepada khalayak. sebagai komunikan pesan tersebut akan

lebih mudah diterima oleh khalayak. Berikut ini *scene* yang di tampilkan dalam dimensi kognisi sosial terkait penyalahgunaan wewenang pemerintahan daerah yang dipaparkan oleh Zainal Arifin Mocthar.

*Tabel 4.8 Kognisi Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Kognisi Sosial |  |
| **Gambar 4.5 (Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)** |
| Zainal merupakan aktivis kelahiran dari Sulawesi Selatan pada 8 Desember 1978. Beliau juga merupakan seorang dosen hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sekaligus sarjana dengan gelar hukum dari Fakultas Hukum UGM pada 2003 lalu. Kemudian beliau juga melanjutkan studi magister magister hukum di Northwestern University, Amerika Serikat pada tahun 2006 dan kembali menempuh pendidikan di UGM untuk mendapat gelar doctor pada tahun 2012. Zainal Mocthar juga pernah menjabat  sebagai Direktur Pukat UGM dan masih aktif |

|  |  |
| --- | --- |
|  | dalam kegiatan anti korupsi melalui lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, serta menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pukat UGM pada tahun 2007. Beliau juga menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2015 hingga 2017, anggota Komisariat PT Pertamina EP dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2022 beliau ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisiall Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di tahun 2023 beliau juga ditunjuk sebagai wakil Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan untuk periode 2023 hingga 2026. |

## Bawaslu dan KPU dianggap tidak kompeten

Temuan penilitian ini membahas sikap dari lembaga independen yang dianggap tidak berkompenten dalam menjalankan tugas pada pemilu 2024. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 secara umum tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar sesuai waktu dan jadwal yang sudah ditentukan meskipun, masih banyak terjadi permasalahan mulai dari penetapan DPT, dalam penyelenggaraan yang masih banyak permasalahan, pelaksanaan kampanye masih juga banyak terjadi pelanggaran dan pada saat pelaksanaan ada permasalahan kecurangan.43 Terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon tertentu dalam berkampanye akan tetapi, sikap yang di tunjukkan oleh bawaslu yang inkompenten terhadap pelanggaran tersebut. Hal yang menjadi keganjalan dalam proses kampanye menjadi salah satu faktor utama.44 Yakni, sikap yang di tunjukkan presiden seolah-olah mendukung pada pasangan calon tertentu. Dalam kasus ini yang akan dipaparkan oleh Feri Amsari sebagai narasumber pada Film Dokumenter *Dirty Vote.*

* + 1. Struktur teks

Fri Amsari (Menit ke 00:56:43-00:58:50)

―saya ingin bercerita permasalahan tadi dengan menuturkan soal Bawaslu tentu saja segala kecurangan itu harus ditangani oleh

43 Kurniawan, ‗*Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya‟*, Jurnal Al-Mujadid, 7.2 (2024), 78–80.

44 Wisnu Nugraha, ‗*DALAM PROSES PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN*

*2024 BERDASARKAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ( BAWASLU ) NOMOR : 003 / PS . REG / BAWASLU / X / 2022*‘, Jurnal UNES LAW REVIEW, 5.4 (2024), 3897–99.

Bawaslu. Dan ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tetapi, faktanya bawaslu inkompeten. Apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu kita bisa melihat video ini.‖

* + - 1. Struktur makro

Dalam struktur makro terdapat elemen Tema/Topik yang terdapat pada penelitian ini yang diambil dari dialog pada narasumber tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan dalam teks dialog tersebut. Sehingga masyarakat mudah untuk memahami dialog yang dipaparkan oleh narsumber tersebut.

*Tabel 4.9 Struktur Makro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Narasi teks di atas yang diucapkan oleh Feri Amsari pada menit 56:43 membahas terkait sikap bawaslu yang inkompenten terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Sikap bawaslu yang tidak tegas dengan kasus deklarasi desa bersatu yang berpotensi mendukung  salah satu paslon tertentu. |

* + - 1. Superstruktur

Dalam Superstruktur terdapat elemen yakni skema. Skema tersebut dapat diartikan sebagai alur dalam cerita Film *Dirty*

*Vote* tersebut, narasi yang diucapkan oleh narasumber merupakan sebagai pesan atau informasi yang struktur agar dapat mudah diapahami di kalangan masyarakat yang menonton film ini.

*Tabel 4.10 Superstruktur*

|  |  |
| --- | --- |
| **Skema/alur** | Pada *scene* tersbut yang di paparkan oleh Feri Amsari membahas tentang bawaslu yang dianggap tidak kompenten terhadap pemilu. Feri Amsari menampilkan beberapa temuan kasus yang ditayangkan dalam bentuk video. Pertma, yakni video deklarasi desa bersatu yang di selenggarakan di GBK. Temuan dalam kasus tersebut feri amsari menjelaskan acara tersebut berpotensi mendukung salah satu paslon tertentu. Kasus kedua yang menjadi sorotan adalah ketika Gibran membagikan susu saat *car free day* (CFD). Acara tersebut dinilai dapat melanggar aturan saat berkampanye. Menurut feri amsari lagi-lagi sikap bawaslu tidak berani untuk menunjukkan sikap tegasnya dalam kasus ini bahkan pihak bawaslu melemparkan kasus  tersebut kepada peraturan daerah. |

* + - 1. Struktur Mikro

Dalam struktur mikro ini dapat diamati dan dianalisis bagian teks terkecil dalam suatu kalimat, anak kalimat, parafrase atau gambar.

*Tabel 4.11 Struktur Mikro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Semantik** (pernyataan yang ingin ditekan dalam narasi tersebut) | **Latar**  *Scene* tersebut membahas adanya sikap tidak kompenten bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Inti dalam pembahasan ini yang dipaparkan oleh Feri Amsari adalah pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02 tidak ada tindak sanksi lebih lanjut yang dilakukan oleh bawaslu. Justru sebaliknya bawaslu tidak memberikan sikap dengan tegas melainkan tidak berani untuk memberikan sanksi kepada pihak paslon 02. Feri Amsari menyayangkan sikap bawaslu yang tidak kompenten dalam menanggapi kasus tersebut. Kasus deklarasi desa bersatu dan bagi-bagi susu gratis yang di lakukan paslon 02 merupakan kasus pelanggaran serius namun, Bawaslu RI tidak berani menanganinya, malah menyerahkan  penanganan prosesnya kepada Bawaslu DKI |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Jakarta. Namun temuan Bawaslu DKI Jakarta menyatakan bahwa kasus ini merupakan  pelanggaran peraturan daerah (Perda). |
| **Sintaksis** (Bagaimana kalimat disusun yang diucapakan sebagai narasi) | **Bentuk kalimat**  Narasi di atas yang diucapkan oleh Feri Amsari merupakan kalimat untuk menjelaskan permasalahan. Feri Amsari memfokuskan kasus tersebut sebagai subjek yang ingin disampaikan kepada khalayak.  **Koherensi**  Pada kalimat ―***Dan*** ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ***tetapi***, faktanya bawaslu inkompeten‖  ―dan‖ dan kata hubung ―tetapi‖ |

* + 1. Konteks Sosial

Dilihat dari *scane* Film *Drty Vote* terdapat konteks yang mempresentasikan adanya temuan Bawaslu dan KPU dianggap tidak kompenten. Terdapat *scene* yang masuk dalam dimensi konteks terkait lembaga independen yakni Bawaslu dan KPU yang dianggap tidak kompenten dalam menjalankan tugas. Berikut *scene* yang dianalisis:

* + - 1. *Scene* 1 (Menit ke 00:58:52-01:02:08)

Feri Amsari

*Scene* 1 pada temuan sikap bawaslu yang tidak kompenten dalam memberikan sanksi kepada paslon yang melanggar aturan untuk berkampanye dan proses syarat lolos parpol yang di tentukan oleh KPU diarasa tidak kompenten dalam memverifikasi pihak parpol tertentu.

*Tabel 4.12 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.1 *scene* 1** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  Feri Amsari: ―Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyatanya Nata harusnya terdapat sanksi yang menjerahkan agar Peristiwa tidak berulang‖  *Scene* diatas Feri Amsari menjelaskan video yang di tampilkan di layar tentang sikap bawaslu yang tidak kompenten dalam menangani kasus pelanggaran yang  dilakukan oleh paslon 02. Feri mangatakan bahwa |

bawaslu RI tidak berani dalam menangani kasus tersebut. Akan tetapi, pihak bawaslu RI mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan wewenang dari PJ Gurbernur DKI. Sikap bawaslu tersebut dinilai tidak kompenten karena bawaslu tidak berani dalam memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02. Bukti kasus ke 2 saat gribran membagikan susu gratis saat *car free day* (CFD) dan juga tidak ada sanksi secara tegas yang di lakukan bawaslu terhadap paslon tersebut.



**Gambar 4.2 *scene* 1** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**

Feri Amsari: ―soal tidak inkompeten atau inkompetennya bawaslu dalam kasus akun X Kementerian Pertahanan, di akun ini terlihat bahwa jelas-jelas ada upaya kampanye terang-terangan di akun resmi tanda contreng. Tetapi kemudian kita bisa ketahui bahwa kasus ini tidak berlanjut karena menurut Bawaslu kurang materi padahal materinya sudah jelas ini

* + - 1. *Scene* ke 2 (Menit ke 01:02:10-01:03:12) Zainal Arifin Mocthar

pemanfaatan ruang atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara integritas yakni Bawaslu‖

Feri Amsari menjelaskan bahwa bawaslu tidak berani mengambil langkah secara tegas dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kementrian yang ditemukan adanya sikap keberpihakan kepada salah satu paslon. Alasan yang dijawab oleh bawaslu menurut feri tidak relevan. Karena, bawaslu menanggapi kasus tersebut beranggapan bahwa kasus tersebut kurang adanya materi kusus untuk membahas kasus tersebut. padahal unggahan di media sosial tersebut jelas adanya potensi mendukung paslon 02.

*Scen*e tersebut yang di jelaskan oleh Zainal Arifin Mocthar adalah proses verifikasi perserta pemilu pada paslon yang mendaftar. Dari presentase tersebut yang ditampilkan melalui Power Point merupakan langkah-langkah atau aturan dalam proses pendaftaran peserta pemilu. Temuan yang di kemukakan oleh narator tersebut adanya potensi sikap tidak netral pihak KPU dalam memverifikasi peserta pemilu pada paslon tertentu.

*Tabel 4.13 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.3 *scene* 2** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  Zainal Arifin Mocthar: ―Mari kita periksa Apakah syarat lolos verifikasi parpol ini dikerjakan KPU dengan baik. Kita kasih satu contoh kasus partai Gelora dalam kasus partai Gelora yang lolos menjadi peserta pemilu. Tetapi kalau kita lihat di lapangan ada begitu banyak kejanggalan kita lihat dari dokumen berita acara KPUD murungraya di Kalimantan tenah. Kalimantan Tengah yang menyatakan ada instruksi KPU agar mengubah status partai Gelora dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.‖  *Scene* diatas memaparkan proses verifikasi yang oleh dilakukan KPU terhadap beberapa parpol dan diduga potensi adanya sikap tidak netral. Zainal menjelaskan data terkait langkah KPU yang tidak  kompenten. Kasus partai Gelora di Klimantan |

* + 1. Kognisi Sosial

Tengah yang lolos menjadi peserta pemilu yang mengalami kejanggalan. Dimana semula partai Gelora tidak memenuhi syarat sebagai peserta tiba- tiba lolos dan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Kognisi sosial merupakan dimensi yang berkaitan dengan wacana yang diproduksi melalui model atau skema yang memengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu objek. Dalam film dokumenter *Dirty Vote*, dimensi kognisi sosial akan menganalisis latar belakang narasumber dalam menyampaikan wacana yang disampaikan. Untuk memudahkan penerimaan infomasi secara jelas kepada khalayak. sebagai komunikan pesan tersebut akan lebih mudah diterima oleh khalayak. Berikut ini *scene* yang di tampilkan dalam dimensi kognisi sosial terkait Bawaslu dan KPU dianggap tidak kompeten yang dipaparkan oleh Feri Amsari.

*Tabel 4.14 Kognisi Sosial*



Kognisi Sosial

**Gambar 4.4 (Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote***) Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M dikenal sebagai seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Saat ini, beliau merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas

Andalas, Padang, Sumatera Barat. Selain pengamat hukum tata negara, ia juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tidak hanya itu, beliau juga aktif menulis dengan tulisan-tulisan subjek korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan. Saat ini tulisan-tulisannya telah banyak dimuat diberbagai media cetak baik lokal maupun nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dan lain- lain. Beliau juga aktif menulis pada jurnal-jurnal terkemuka terakreditas dan terindeks Scopus. Jejak pendidikannya dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dan berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 2008. Pendidikan magisternya juga ditempuh di universitas yang sama dengan IPK cumlaude. Kemudian melanjutkan magister perbandingan hukum Amerika dan Asia pada William and Mary Law School, Virginia.

## Mahkamah Konstitusi sebagai tembok terakhir demokrasi dinilai sebaliknya

Temuan ini membahas kasus yang paling inti dalam temuan penelitian sebelumnya. Beberapa *scene* dari kasus ini membicarakan tentang putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memihak salahsatu paslon tertentu. Putusan MK dinilai sarat akan kejanggalan di berbagai sisi. Dalam putusan MK seharusnya tidak ada intervensi apapun bentuknya dan harus menjalankan tugas sesuai UUD untuk menegakkan keadilan. Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, adalah hasil reformasi yang dihasilkan dalam perubahan sistem ketatanegaraan. Lahirnya lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi juga merupakan hasil reformasi melalui amandemen UUD 1945. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan ―Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi‖. Sehingga, ketentuan norma Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi.45

Putusan MK tersebut dinilai tidak menunjukkan sikap independen

yang berpotensi mendukung paslon 02. Salah satu pelanggaran yang jelas

45 Wilma Silalahi, ‗*PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT*

*TAHAPAN PEILU BERLANGSUNG*‘, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 5.1 (2023), 13– 18.

dilakukan oleh MK adalah mengenai kode etik. Aturan mengenai kode etik hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan performa hakim itu sendiri.46 Peraturan mengenai etika profesi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Dalam panduan tersebut menjelaskan bahwa kode etik diartikan sebagai pedoman keutamaan moral bagi setiap hakim dalam kedinasan mauapun diluar kedinasan. Selanjutnya, secara rinci juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo.Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Jika aturan tersebut dilanggar maka hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya.47 Kasus ini terkait dengan putusan MK yang akan dijelaskan oleh narasumber Bivitri Susanti sebagai narasumber pada Film Dokumenter *Dirty Vote.*

* + 1. Struktur teks

Dalam *scene* ini terdapat beberapa narasi yang dapat diteletiti sebagai Struktur teks yang dipaparkan oleh narasumber. Pertama, Kontradiksi mahkamah Konstitusi bahwa syarat pencalonan yang berupa *presidential threshold* 31 kali ditolak oleh MK dengan berbagai alasan.

46 Novendri M Nggilu, *„Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “ Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against‟,* Jurnal Konstitusi, 16.1 (2019), 46–48.

47 Madani Jurnal and others, ‗*Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023‟*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin,

1.11 (2023), 261.

Namun ketika ada syarat lain yang dilanjutkan hanya dengan satu kali permohonan, MK menerima hingga berlanjut sampai putusan MK. Kedua, Cara instan ubah UU tanpa DPR. Menjelaskan tentang putusan MK mengenai batas usia Cawapres dinilai lahir secara instan. Hal itu terjadi karena perubahan undang-undang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Ketiga, Permohonan sempat dicabut dan di daftarkan lagi pada hari libur Bivitri mengungkapkan temuan bahwa permohonan mengenai batas usia Cawapres pada saat itu sempat dicabut. Namun permohonan tersebut akhirnya didaftarkan kembali pada hari libur.

* + - 1. *Scene* 1 (Menit ke 01:18:02-01:20:17)

Bivitri Susanti

―Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama. Mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi puncak dari cerita- cerita yang dari tadi sudah kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita melihat ada kontradiksi di Mahkamah Konstitusi bayangkan sebuah pagar, untuk memagari pencalonan presiden dan wakil presiden di satu sisi untuk syarat mencalonkan yang berupa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 31 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. Tetapi, ketika ada syarat lain yang diminta untuk diubah tiba-tiba Mahkamah Konstitusi membuka pintu lebar-lebar hanya satu kali permohonan.‖

* + - * 1. Struktur Makro

Dalam struktur makro terdapat elemen Tema/Topik yang terdapat pada penelitian ini yang diambil dari dialog pada narasumber tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan dalam teks dialog tersebut. Sehingga masyarakat mudah untuk memahami dialog yang dipaparkan oleh narsumber tersebut.

*Tabel 4.15 Struktur Makro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Pada narasi teks di atas yang dipaparkan oleh Bivitri Susanti pada menit 01:18:02 membahas tentang temuan kasus adanya kontradiksi bahwa syarat pencalonan yang berupa *presidential threshold* 31 kali ditolak oleh MK dengan berbagai alasan. Namun ketika ada syarat lain yang dilanjutkan hanya dengan satu kali permohonan, MK menerima hingga berlanjut sampai putusan MK.Serta ditemukan kasus Mahkamah Konstitusi diduga mendukung paslon 02  untuk memenangkan pemilu. |

* + - * 1. Superstruktur

Dalam Superstruktur terdapat elemen yakni skema. Skema tersebut dapat diartikan sebagai alur dalam cerita Film

*Dirty Vote* tersebut, narasi yang diucapkan oleh narasumber merupakan sebagai pesan atau informasi yang struktur agar dapat mudah diapahami di kalangan masyarakat yang menonton film ini.

*Tabel 4.16 Superstruktur*

|  |  |
| --- | --- |
| **Skema/alur** | *Scene* di atas membahas tentang temuan beberapa kasus yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya MK sebagai tembok terakhir malah sebaliknya banyak terjadi pelanggaran. Kasus tersebut dipaparkan oleh Bivitri Susanti dengan dijelaskan secara detail dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak. Kasus tersebut dijelaskan menggunakan *Power Point* karena terdapat beberapa point yang sangat penting untuk dibahas. Salah satunya kontradiksi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan. Bivitri mengungkapkan bahwa syarat pencalonan yang berupa *presidential threshold* 31 kali ditolak oleh MK dengan berbagai alasan. Namun ketika ada syarat lain yang dilanjutkan hanya dengan satu  kali permohonan, MK menerima hingga |

* + - * 1. Struktur Mikro

berlanjut sampai putusan MK.

Dalam struktur mikro ini dapat diamati dan dianalisis bagian teks terkecil dalam suatu kalimat, anak kalimat, parafrase atau gambar.

*Tabel 4.17 Struktur Mikro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Semantik** (pernyataan yang ingin ditekan dalam narasi tersebut) | **Latar**  *Scene* tersebut membahas temuan kasus yang diduga terdapat keganjalan dalam putusan MK. Bentuk keganjalan tersebut terkait permohonan yang secara cepat disetujui dan dilanjut dengan putusan MK. Karena menurut Bivitri Mahakamah Konstitusi merupakan bentuk Peradilan yang melambangkan supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir keadilan yang sudah sepatutnya bersifat netral dan dapat memberikan perlakuan hukum yang adil. Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta, diharapkan memiliki profesionalitas  yang tinggi dalam mempertimbangkan dan |

|  |  |
| --- | --- |
|  | menetapan keputusan hukum di suatu  perkara. |
| **Sintaksis** (Bagaimana kalimat disusun yang diucapakan sebagai narasi) | Narasi *scene* di atas yang diucapkan oleh Bivitri Susanti merupakan kalimat untuk menjelaskan permasalahan. Bivitri Susanti memfokuskan kasus tersebut sebagai subjek yang ingin disampaikan kepada khalayak.  **Koherensi**  ―Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama. ***Mengapa*** Mahkamah Konstitusi menjadi puncak dari cerita-cerita yang dari tadi sudah kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita melihat ada kontradiksi di Mahkamah Konstitusi bayangkan sebuah ***pagar,*** untuk memagari pencalonan presiden dan wakil presiden di satu sisi ***untuk*** syarat mencalonkan yang berupa ambang batas pencalonan presiden ***atau*** presidential threshold 31 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. ***Tetapi,*** ketika ada syarat lain yang  diminta untuk diubah tiba-tiba Mahkamah |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Konstitusi membuka ***pintu*** lebar-lebar  ***hanya*** satu kali permohonan.‖  Pada teks kalimat di atas yang terdapat beberapa kata hubung dan kiasan:   1. Kata Hubung: dan, tetapi, mengapa, hanya, untuk. 2. Kata Kiasan: Pagar, pintu.   **Kata Ganti**  pada kalimat teks tersebut Bivitri menggunakan kata ganti: kita, yang.   * + **kita** melihat ada kontradiksi di Mahkamah Konstitusi   + **yang** berupa ambang batas pencalonan presiden |

* + - 1. *scene* ke 2 (Menit ke 01:22:26-01:24:16) Feri Amsari

―kami ingin memulai dengan argumentasi bahwa setiap peristiwa bahkan kejahatan bisa dibongkar dengan mengungkap siklus waktu. Pada 9 Maret partai solidaritas Indonesia mengajukan permohonan pengujian ndang- undang Pemilu, tepatnya pasal 169 huruf q yang mengatur

soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ketentuan yang menghendaki hanya orang yang sudah berusia 40 tahun yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden PSI menginginkan diatur hanya orang telah berusia 35 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon. Yang menarik dari PSI adalah ketika permohonan ini berjalan komposisi ketua atau pimpinan PSI di rombaak Gibran yang merupakan Kakak dari kaesang yang semula diajukan sebagai calon presiden oleh PSI mengganti ketuanya menjadi adik Gibran yaitu kaisang lalu harus diingat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman dari Gibran dan Kaesang juga sangat penting dalam perkara itu karena ini pengujian undang-undang maka dengan sendirinya termohon dalam pengujian ini adalah pemerintah yang dipimpin oleh ayah Gibran yaitu Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi catatan penting kalau kita bicara konflik kepentingan dalam perkara ini.‖

* + - * 1. Struktur Makro

Dalam struktur makro terdapat elemen Tema/Topik yang terdapat pada penelitian ini yang diambil dari dialog pada narasumber tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan dalam teks dialog tersebut. Sehingga masyarakat

mudah untuk memahami dialog yang dipaparkan oleh narsumber tersebut.

*Tabel 4.18 Struktur Makro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Pada *scene* di atas menit ke 01:22:26 yang diapaparkan oleh Feri Amsari menjelaskan tentang adanya temuan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh MK dalam mengambil putusan. Dan Feri juga memaparkan sikap keberpihakan  pada paslon dan partai tertentu. |

* + - * 1. Superstruktur

Dalam Superstruktur terdapat elemen yakni skema. Skema tersebut dapat diartikan sebagai alur dalam cerita Film *Dirty Vote* tersebut, narasi yang diucapkan oleh narasumber merupakan sebagai pesan atau informasi yang struktur agar dapat mudah diapahami di kalangan masyarakat yang menonton film ini.

*Tabel 4.19 Superstruktur*

|  |  |
| --- | --- |
| **Skema/alur** | *Scene* tersebut membahas tentang ptusan MK terkait batas usia pencalonan wakil presiden yang secara instan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Selain membahas tentang aturan batas usia |

mempermudah proses putusan syarat pencalonan wakil presiden. Intervensi parpol terhadap MK sangat berpengaruh terhadap putusan yang dibuatn MK pasalnya Feri mengatakan desakan dari partai PSI untuk batas usia syarat pencalonan yang aslinya 40 tahun

menjadi 35 tahun.

untuk

berupaya

yang

partai

pencalonan Feri Amsari menemukan

indikasi kberpihakan kepada salah satu

* + - * 1. Struktur Mikro

Dalam struktur mikro ini dapat diamati dan dianalisis bagian teks terkecil dalam suatu kalimat, anak kalimat, parafrase atau gambar.

*Tabel 4.20 Struktur Mikro*

|  |  |
| --- | --- |
| **Semantik** (pernyataan yang ingin ditekan dalam narasi tersebut) | **Latar**  Pada *scene* tersebut yang ditekan dalam pembahasan tersebut adalah keputusan MK yang diajukan oleh pemohon disetujui secara instan dan upaya potensi intervensi pada Parpol PSI berdampak  besar pada putusan MK. Putusan tersebut |

|  |  |
| --- | --- |
|  | tentu menguntungkan pada salah satu Paslon (pasangan calon). Melihat indikator dan rasionalitas pertimbangan hukum yang dibangun oleh MK cukup sulit menolak anggapan tersebut. Karena faktanya, MK menunjukkan sikap  inkonsistensi pada putusan tersebut. |
| **Sintaksis** (Bagaimana kalimat disusun yang diucapakan sebagai narasi) | Narasi *scene* di atas yang diucapkan oleh Feri Amsari merupakan kalimat untuk menjelaskan permasalahan. Feri Amsari memfokuskan kasus tersebut sebagai subjek yang ingin disampaikan kepada khalayak. |
|  | **Koherensi**  ―kami ingin memulai dengan argumentasi ***bahwa*** setiap peristiwa bahkan kejahatan bisa dibongkar dengan mengungkap siklus waktu. Pada 9 Maret partai solidaritas Indonesia mengajukan permohonan pengujian ndang-undang Pemilu, tepatnya pasal 169 huruf q yang mengatur soal batas usia calon presiden  ***dan*** calon wakil presiden ketentuan yang |

|  |  |
| --- | --- |
|  | menghendaki hanya orang yang sudah berusia 40 tahun yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden ***atau*** calon wakil presiden PSI menginginkan diatur hanya orang telah berusia 35 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon. Yang menarik dari PSI adalah ***ketika*** permohonan ini berjalan komposisi ketua atau pimpinan PSI di rombaak Gibran yang merupakan Kakak dari kaesang yang semula diajukan sebagai calon presiden oleh PSI mengganti ketuanya menjadi adik Gibran yaitu kaesang lalu harus diingat ***bahwa*** Ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman dari Gibran dan Kaesang juga sangat penting dalam perkara itu ***karena*** ini pengujian undang- undang maka dengan sendirinya termohon dalam pengujian ini adalah pemerintah ***yang*** dipimpin oleh ayah Gibran yaitu Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi catatan penting kalau kita bicara konflik kepentingan dalam perkara  ini.‖ |

argumentasi.‖

dengan

memulai

ingin

"pemerintah yang dipimpin oleh ayah Gibran yaitu Presiden Joko Widodo."

* **kita** – digunakan sebagai kata ganti orang pertama jamak, merujuk pada pembicara dan orang yang diajak berbicara, seperti dalam "kalau kita bicara konflik kepentingan."
* **kami** – digunakan untuk merujuk pada pihak yang berbicara atau

penulis, misalnya dalam "kami

dalam

seperti

seseorang,

Pada teks kalimat di atas yang terdapat beberapa kata hubung:

* Bahwa, dan, yang, sehingga, ketika, karena, apakah, atau, juga.

**Kata Ganti**

pada kalimat teks tersebut Feri Amsari menggunakan kata ganti:

* **nya** – digunakan untuk merujuk

pada kepemilikan atau milik

sebelumnya, seperti dalam "yang

merupakan kakak dari Kaesang."

disebutkan

sudah

yang

- **dia** – merujuk pada seseorang

* + 1. Konteks Sosial

Dilihat dari *scane* Film *Drty Vote* terdapat konteks yang mempresentasikan adanya temuan Mahkamah Konstitusi sebagai tembok terakhir demokrasi dinilai sebaliknya. Terdapat s*cene* yang masuk dalam dimensi konteks terkait lembaga independen yakni Kontradiksi mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan untuk pencalonan wakil presiden. Berikut *scene* yang dianalisis:

* + - 1. *Scene* ke 1 (Menit ke 01:23:13-01:24:47) Feri Amsari

*Scene* tersebut membahas tentang alur pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dari beberbgai pemohon yakni dari beberpa Parpol dan Almas Tsaqibbiru.

*Tabel 4.21 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.1 *scene* 1** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  Feri Amsari: ―tepatnya pasal 169 huruf q yang mengatur soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ketentuan yang menghendaki hanya orang yang sudah berusia 40 tahun yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden PSI menginginkan diatur hanya orang telah berusia 35 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon‖ Pada *scene* ke 1 (Menit ke 01:23:13-01:24:47) Feri memaparkan tentang pengajuan syarat batas usia pencalonan sebagai wakil presiden. Pada temuan kasus tersebut pemohon dari partai PSI mengajukan pemohonan usia pencalonan wakil presiden dari minimal berusia  40 tahun menjadi 35 tahun. Feri menjelaskan |

* + - 1. *Scene* ke 2 (Menit ke 01:26:37-01:27:50) Bivitri Susanti

kasus tersebut dengan menampilkan data mengenai waktu dan tanggal pemohon tersebut diajukan di Mahkamah Konstitusi. Pada *scene* tersebut tidak hanya partai PSI yang mengajukan permohonan, partai garuda dan kelima kepala daerah juga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

*Scene* kedua ini lanjutan dari *scene* yang sebelumnya, yakni membahas tentang runtutan pengajuan permohonan yang diajukan oleh beberapa pemohon. Dengan penjelesan yang diucapkan Bivitri, bahwa putusan tersebut memang sudah terbaca oleh hakim untuk indikasi tertolak. Akan tetapi, sikap yang ditunjukkan hakim tidak konsisten terhadap putusan MK.

*Tabel 4.22 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.2 *scene* 2** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  Bivitri Susanti: ―Para hakim dan semua yang ada di situ yang formal sebenarnya terbaca bahwa hakim-hakim punya indikasi akan menolak tiga permohonan ini. Karena mereka melihat dan ini baik secara umum. Bahwa masalah syarat kepala daerah itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan memang wewenang pembentuk undang-undang.‖  *Scene* ke 2 (Menit ke 01:26:37-01:27:50) Bivitri memaparkan temuan tentang alur pengajuan permohonan. yang menarik dari sidang putusan uji materil ini adalah MK meskipun telah menolak gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi minimal 35  tahun justru mengabulkan permohonan |

seseorang yang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah menjadi

capres dan cawapres.

memperbolehkan

untuk

Tsaqibbirru

pemohon untuk sebagian terdapat dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang

diajukan oleh mahasiswa bernama Almas

* + - 1. *Scene* ke 3 (Menit ke 01:41:16-01:45:18) Bivitri Susanti

*Scene* ini mejelaskan sembilan hakim yang terlibat dalam memutuskan perkara dalam kasus tersebut. Para hakim tersebut sangat berperan penting dalam menyelesaikan kasus ini. Yakni tiga hakim mengabulkan dua hakim *concurring opinion* dan empat hakim *dissenting opinion* diantara hakim konstitusi.

*Tabel 4.23 Konteks Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Konteks Sosial | **Gambar 4.3 *scene* 3** **(Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  Bivitri Susanti: ―Ada apa sebenarnya di balik putusan nomor 90 itu, kalau digambarkan secara luas kira-kira kan seperti ini ada orang Hakim Mahkamah Konstitusi kita lihat dulu dari yang mengabulkan ada tiga orang yang mengabulkan di sini Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Paman Gibran Guntur Hamzah yang tadi sudah diceritakan konsistensinya kemudian yang ketiga ada Manahan sitompul kemudian di ujungnya karena dia sangat bertolak belakang ada empat orang yang menolak.‖ Pada *scene* ke 3 (Menit ke 01:41:16- 01:45:18) tersebut mebahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi diputus dengan cara  suara yang tidak bulat, dikarenakan ada |

dikabulkan, da nada yang mengatakan agar perkara tersebut dapat ditolak, dan beberapa ada yang berpendapat bahwa seharusnya perkara tersebut tidak dapat diterima. Dengan adanya perbedaan pendapat dari para hakim konstitusi jika dilihat dengan berdasarkan pada sudut pandang hukumnya, maka seharusnya pendapat hakim mayoritas

itulah yang akan diikuti.

dapat

seharusnya

tersebut

perkara

*dissenting opinion* dan *concurring opinion*

diantara para hakim konstitusi. Terdapat beberapa hakim yang berpendapat bahwa

* + 1. Kognisi Sosial

Kognisi sosial merupakan dimensi yang berkaitan dengan wacana yang diproduksi melalui model atau skema yang memengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu objek. Dalam film dokumenter *Dirty Vote*, dimensi kognisi sosial akan menganalisis latar belakang narasumber dalam menyampaikan wacana yang disampaikan. Untuk memudahkan penerimaan infomasi secara jelas kepada khalayak. sebagai komunikan pesan tersebut akan lebih mudah diterima oleh khalayak. Berikut ini *scene* yang di tampilkan dalam dimensi kognisi sosial terkait Mahkamah

Konstitusi sebagai tembok terakhir demokrasi dinilai sebaliknya yang dipaparkan oleh Bivitri Susanti.

*Tabel 4.24 Kognisi Sosial*

|  |  |
| --- | --- |
| Kognisi Sosial | **Gambar 4.4 (Sumber: Film Dokumenter *Dirty Vote*)**  Bivitri Susanti lahir di Jakarta, 5 Oktober 1974. Beliau merupakan lulusan hukum di Universitas Indonesia tahun 1999. Sebelum lulus Bivitri bersama rekannya sempat membangun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Beliau juga melanjutkan studi magister di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2022. Dari Warwick, Bivitri juga menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law, AS. Beliau juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar tata negara.  Selain itu, Bivitri juga pernah tergabung dalam  Koalisi Konstitusi Baru (1999-2022), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan , Tenaga Ahli |

untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005-2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007-2009), hingga advokasi berbagai undang- undang. Saat ini beliau tercatat sebagai pengajar tetap di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, dikutip dari situs resmi PSHK.

Di tahun 2018, Bivitri juga meraih Anugerah Konstitusi M yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara.